

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang. Ada 17 tujuan SDG's yang saling terkait dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan global. SDG's merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat di seluruh negara. Ketujuh belas tujuan TPB adalah (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pendidikan berkualitas, sehingga mencapai tujuan pendidikan berkualitas, terdapat beberapa indikator, yaitu Pertama, proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat. Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.

Kedua, proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin. Ketiga, tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin. Keempat, tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. Kelima, angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).

Selanjutnya keenam, Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ketujuh, rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas. Kedelapan, persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. Kesembilan, proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).

Indikator kesepuluh, pengarusutamaan (i) pendidikan kewargaan global, dan (ii) pendidikan pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang tercantum dalam (a) kebijakan pendidikan, (b) kurikulum pendidikan, (c) pelatihan guru, (d) asesmen siswa, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kesebelas, persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir. Keduabelas, jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang. Ketigabelas, persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.

Jauh sebelum disepakatinya SDG's, Pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar. Hal ini merupakan wujud dari amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Indonesia memulai sejak tanggal 2 Mei 1984 dengan program wajib belajar 6 tahun atau pendidikan dasar. Setelah berjalan selama 10 tahun, pada tanggal 2 Mei 1994 dikeluarkanlah Inpres Nomor 1 Tahun 1994 yang menjadi dasar bagi program Wajib Belajar 9 tahun sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Program wajib belajar 9 tahun terus berjalan hingga pada Juni 2015 ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Program wajib belajar ini didukung dengan pengalokasian anggaran APBN maupun APBD untuk menanggung biaya pendidikan. Hal ini dilakukan agar para peserta didik dapat mengenyam pendidikan sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas secara gratis. Sejak tahun 2009, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban pengalokasian 20% anggaran pada APBN/APBD untuk anggaran pendidikan.

Selanjutnya keenam, Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ketujuh, rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas. Kedelapan, persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. Kesembilan, proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).

Indikator kesepuluh, pengarusutamaan (i) pendidikan kewargaan global, dan (ii) pendidikan pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang tercantum dalam (a) kebijakan pendidikan, (b) kurikulum pendidikan, (c) pelatihan guru, (d) asesmen siswa, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kesebelas, persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir. Keduabelas, jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang. Ketigabelas, persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.

Jauh sebelum disepakatinya SDG's, Pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar. Hal ini merupakan wujud dari amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Indonesia memulai sejak tanggal 2 Mei 1984 dengan program wajib belajar 6 tahun atau pendidikan dasar. Setelah berjalan selama 10 tahun, pada tanggal 2 Mei 1994 dikeluarkanlah Inpres Nomor 1 Tahun 1994 yang menjadi dasar bagi program Wajib Belajar 9 tahun sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Program wajib belajar 9 tahun terus berjalan hingga pada Juni 2015 ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Program wajib belajar ini didukung dengan pengalokasian anggaran APBN maupun APBD untuk menanggung biaya pendidikan. Hal ini dilakukan agar para peserta didik dapat mengenyam pendidikan sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas secara gratis. Sejak tahun 2009, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban pengalokasian 20% anggaran pada APBN/APBD untuk anggaran pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Dalam hal ini Pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). SPM Pendidikan yang ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Sehingga, pemerintah kota/kabupaten bertanggung jawab atas pelayanan pendidikan di Tingkat SD dan SMP.

Kota Tangerang adalah salah satu kota yang berada di bawah Provinsi Banten sekaligus berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sebagai kota penyangga Jakarta, Kota Tangerang termasuk kota besar dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa. Sebagian dari penduduk Kota Tangerang termasuk para pekerja atau pengusaha yang beraktivitas di Jakarta. Oleh karena itu, kualitas SDM penduduk Kota Tangerang harus dapat bersaing.

Menurut data Kemendikbud pada tahun 2023 semester ganjil, jumlah SD Negeri di Kota Tangerang sebanyak 271 sekolah. Sedangkan jumlah SMP Negeri di Kota Tangerang hanya 34 sekolah. Sedangkan data sekolah swasta lebih banyak, yaitu 149 SD swasta dan 167 SMP swasta. Hal ini tidak sejalan dengan program wajib belajar, karena banyak peserta didik lulusan SD Negeri yang tidak tertampung ke dalam SMP Negeri di Kota Tangerang. Hal ini disebabkan jika melanjutkan ke SMP swasta, maka orang tua murid harus membayar biaya pendidikan mulai dari pendaftaran, hingga SPP setiap bulannya.

Tabel 1.1

Data Sekolah SD dan SMP di Kota Tangerang

No	Data Sekolah	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta
1.	SD	271	149
2.	SMP	34	167

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/286100>, (diakses September 2024)

Selain kendala jumlah sekolah yang terbatas, kebijakan baru berupa sistem zonasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga memberikan efek pada meningkatnya jumlah jumlah anak yang tidak sekolah SMP.

Sistem zonasi diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2017 dalam rangka reformasi dengan tujuan pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan. Peserta didik yang akan diterima oleh sekolah berdasarkan beberapa kriteria antara lain jarak tempuh dari rumah ke sekolah, kapasitas sekolah, dan wilayah administrasi tertentu. Dengan sistem ini Mendikbud Muhadjir Effendy berharap tidak ada lagi favoritisme terhadap sekolah unggulan. Pemerintah kemudian akan memenuhi sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan agar kualitas pendidikan merata di semua sekolah.

Menurut data BPS di laman BPS Kota Tangerang, Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kota Tangerang pada tahun 2021 – 2023 SD lebih tinggi dari SMP dan SMA. Bahkan pada tahun 2022 terjadi penurunan APK dan meningkat kembali di tahun 2023, akan tetapi peningkatannya hanya terjadi di tingkat SD dan SMP, dan SMA tetap terjadi penurunan. Sedangkan rata-rata lama sekolah di Kota Tangerang ada di kisaran 10,83 – 10,91 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah warga Kota Tangerang hanya sampai kelas 10 atau tidak tamat SMA.

Tabel 1.2

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Rata-rata Lama Sekolah

No	Deskripsi	2021	2022	2023
1.	APK SD/MI	102,77	102,60	106,88
2.	APK SMP/MTs	94,41	89,76	93,31
3.	APK SMA/MA	85,65	83,06	80,88
4.	Rata-rata lama sekolah	10,83	10,84	10,91

Sumber : <https://tangerangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQxIzI=/angka-partisipasi-kasar-apk-menurut-jenjang-pendidikan-di-kota-tangerang.html> (diakses Oktober 2024)

Pemerintah Daerah Kota Tangerang memberikan solusi dalam akses pendidikan gratis bagi warga yang berusia 7 – 15 tahun. Antara lain adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program Tangerang Cerdas, dan pembentukan Satgas Wajib Belajar. Satgas ini bertugas mendata, memverifikasi anak putus sekolah, melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Program Tangerang Cerdas adalah program untuk memberikan bantuan kepada anak didik SD sebesar Rp 80.000 per bulan dan anak didik SMP sebesar Rp 100.000 per bulan.

Dana tersebut dimanfaatkan oleh murid yang kurang mampu dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk membeli kebutuhan perlengkapan sekolah.

Dalam rangka mengurangi gap antara jumlah SD Negeri dan SMP Negeri adalah dengan penambahan ruang kelas atau sekolah baru menjadi solusi utama dalam permasalahan ini. Akan tetapi kebutuhan anggaran dan waktu yang dibutuhkan dalam menambah ruang kelas atau sekolah negeri baru cukup besar, sehingga dibutuhkan alternatif lain sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Di sisi lain jumlah sekolah swasta yang mencapai 167 sekolah juga akan terpengaruh dengan bertambahnya sekolah negeri yang gratis. Sehingga diperlukan adanya sebuah terobosan dalam penyelenggaraan Pendidikan agar peserta didik tetap dapat bersekolah akan tetapi tidak terbebani dengan biaya yang besar, di sisi lain sekolah swasta tetap bisa bertahan dan berkontribusi dalam pendidikan di Kota Tangerang.

Sejak tahun ajaran 2022/2023, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan program Sekolah Menengah Pertama swasta gratis. Program Sekolah Menengah Pertama Gratis ini didasari oleh beberapa peraturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. Pertama tertuang dalam Perda No 3 tahun 2022 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kedua, Peraturan Walikota kedua yang dikeluarkan adalah nomor 21 tahun 2022 tentang tata cara pemberian biaya Pendidikan peserta didik pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Swasta. Ketiga adalah Peraturan Walikota nomor 91 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Nonpersonal Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah. Ketiga Peraturan tersebut membahas secara teknis pemberian bantuan untuk satuan Pendidikan maupun peserta didik yang berada dalam kewenangan Pemda Kota Tangerang yaitu Sekolah Dasar atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

Program sekolah swasta gratis adalah program yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk menurunkan angka putus sekolah. Di tahun 2023, Pemerintah Kota Tangerang menggratiskan sekolah di 73 SMP dan MTS swasta. Program ini akan membebaskan peserta didik dari biaya non personal seperti pendaftaran, ujian, ulangan, iuran, SPP dan lainnya. Seluruh kebutuhan dibiayai oleh APBD Kota

Tangerang. Akan tetapi untuk kebutuhan personal seperti seragam, buku, dan lainnya tetap ditanggung oleh orang tua siswa.

Dengan ini kami ingin menganalisis tentang Implementasi Program Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Gratis oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Selain itu apakah kebijakan ini memberikan manfaat bagi setiap stake holder baik peserta didik, pihak sekolah, maupun pemerintah daerah. Kami juga akan menggali faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dari kebijakan ini di Kota Tangerang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah ini yaitu : Bagaimana implementasi program pendidikan Sekolah Menengah Pertama swasta gratis oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pendidikan SMP swasta gratis oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi ilmu pengetahuan, khususnya terkait implementasi program SMP Swasta Gratis oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian dengan topik pembahasan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan menjadi rekomendasi oleh Dinas Pendidikan serta evaluasi terhadap program SMP Swasta Gratis di Kota Tangerang sehingga kebijakan tersebut menjadi lebih baik dan dapat menjadi contoh bagi Daerah lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan topik yang dibahas dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari Bab 1 tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya Bab 2 tentang tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu, kerangka teori terkait implementasi, implementasi, dan kerangka pemikiran. Pada Bab 3 tentang metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data yang berisi metode pengumpulan data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisa data yang terdiri dari triangulasi data dan analisis data.

Pada Bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari hasil penelitian dan implementasi program SMP swasta gratis oleh Dinas Pendidikan kota Tangerang. Pada Bab 5 tentang kesimpulan dan saran terdiri dari kesimpulan dan saran. Terakhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

